

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2018**



**Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Kamboja No. 15 Telp./Fax (0517) 21370
email : dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com
KANDANGAN - 71212**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Kamboja No.15 Telp./Fax.(0517) 21370
e-mail : dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com
KANDANGAN 71212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 020 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun kedepan;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana diktum PERTAMA memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Renstra Dinas Ketahanan Pangan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal Juni 2018

Kepala Dinas,

K. H. RUHAIMI ALMAN, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19601014 198703 1 009

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kab. HSS



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Renja SKPD Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan SKPD sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018. Penyusunan Perubahan Renja SKPD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dalam semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan khususnya aparatur lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD dan Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Perubahan Rencana kerja ini dapat ditindaklanjuti untuk menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja semua gerak, pikiran dan aktivitas jajaran Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2018.

Kandangan, Juni 2018

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Is. H. RUHIMI ALMAN, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19601014 198703 1 009



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

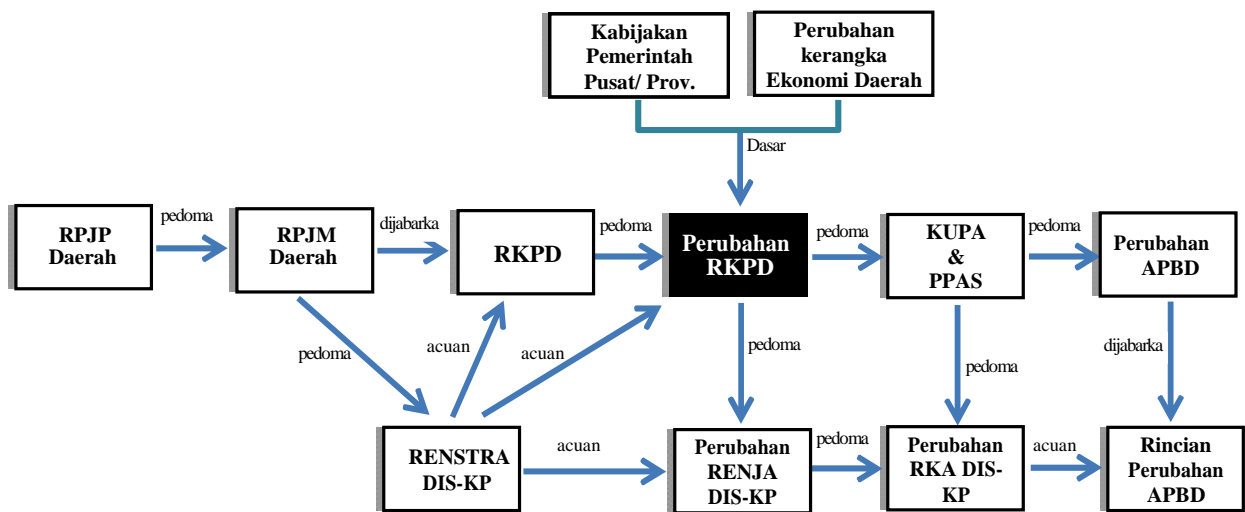
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan program kegiatan jangka waktu 1 (satu) tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Penjabaran RKPD oleh SKPD disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD. Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, dan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengantisipasi permasalahan yang dihadapi juga mempertimbangkan Kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan serta usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010 pada pasal 285 disebutkan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan evaluasi perhitungan anggaran tahun 2017, yang salah satunya adalah tidak terpenuhinya asumsi SILPA Tahun Anggaran 2017, sehingga perlu dilakukan pengurangan belanja sebesar 1 % dari total belanja langsung SKPD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja Perubahan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, sedangkan tujuannya adalah:

1. Memenuhi kebutuhan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
2. Mengakomodir kegiatan yang belum tertuang dalam Renja namun telah dianggarkan dalam APBD karena memenuhi kebijakan pemerintah pusat dan atau provinsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 disusun berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**
- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
 - B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 - D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
 - C. Program dan Kegiatan
- BAB IV : PENUTUP**
- LAMPIRAN**
1. Pra – RKAP SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017

Evaluasi Renja tahun 2017 dijadikan dasar penyusunan Renja tahun 2018 dan Perubahan Renja tahun 2018, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realisasi target capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Evaluasi Renja tahun 2017 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan anggaran tahun 2017. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan tahun 2017 terhadap RPJMD, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menurut kategori urusan wajib bukan pelayanan dasar. Target kinerja yang dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan indikator capaian pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan evaluasi kinerja Renja tahun 2017 antara lain untuk :

1. Mengetahui realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan, beserta faktor penyebabnya.
2. Mengetahui Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
3. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan 6 (*enam*) program dengan 23 (*dua puluh tiga*), yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 alokasi anggaran terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.671.385.000,00, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.450.690.245,00.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NN O	SASARAN STRATEGIS	IKU/ INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2017	KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
				Capaian	(%)			
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	59,653 Ton	59,653 Ton	100 %	Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	465.070.000
							Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Desa Mandiri Pangan	96.640.000
							Koordinasi Kebijakan Perberasan	112.960.000
2	Tingkat Konsumsi Pangan Utama	Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Beras	26.571.901 Kg/tahun	26.571.901 Kg/tahun	100 %	Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Pengembangan Diversifikasi Pangan / Tanaman	195.359.000
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama: Daging/Unggas	1.528.096 Kg/Tahun	1.528.096 kg/tahun	100 %			
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Ikan	8.064.954 Kg/tahun	8.064.954 kg/tahun	100 %			
		Skore Pola Pangan Harapan	79,72	80,9	101,48 %		Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	115.987.880
3	Terjamin-nya 4 Komoditi Pangan Segar (tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)	Persentase Pangan segar yang tercemar	≤ 20 %	0	100%	Peningkatan Pengawasan Pangan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	65.480.00
4	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.880.000
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.840.000
							Penyebarluasan Informasi dan Topuksi SKPD	11.000.000
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.900.000

NN O	SASARAN STRATEGIS	IKU/ INDIKATO R KINERJA	TARGET TAHUN 2017	KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				Capaian	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.471.200
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.986.000
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor	950.000
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.790.250
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000
							Penyediaan Makanan dan Minuman	15.015.000
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	145.463.635
							Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis	31.250.000
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.000.000
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak-lanjuti	100 %	100 %	100%	Peningkatan Sarana/Prasarana	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	21.000.000
							Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	23.600.000
		Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB	-	-	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.897.280
		Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak-lanjuti	100 %	100 %	100%			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sebesar 87,63 %, sedangkan realisasi fisiknya mencapai hampir 100%. Program dan kegiatan pada tahun 2017 didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 1.450.690.245 dan terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.271.251.662 atau 87,38%.

1. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 465.070.000,- realisasi sebesar Rp. 425.687.992,- (91,53 %)
2. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Desa Mandiri Pangan dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 96.640.000,- realisasi sebesar Rp. 96.240.000,- (99,59 %)
3. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 112.960.000,- realisasi sebesar Rp. 103.909.886,- (91,99 %)
4. Capaian Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pangan / Tananaman dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 195.359.000,- realisasi sebesar Rp. 112.598.729,- (62,75 %)
5. Capaian Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 115.987.880,- realisasi sebesar Rp. 107.842.000,- (92,98 %)
6. Capaian Program Peningkatan Pengawasan Pangan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 65.480.000,- realisasi sebesar Rp. 57.467.600,- (87,76 %)
7. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 345.696.085,- realisasi sebesar Rp. 308.243.255,- (89,16 %)
8. Capaian Program Peningkatan Sarana Prasarana dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 44.600.000,- realisasi sebesar Rp. 40.365.000,- (90,50 %)
9. Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 8.897.280,- realisasi sebesar Rp. 8.896.600,- (99,99 %)

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 Sampai dengan Triwulan II

Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut akan teraplikasi dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2018 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Adapun hasil evaluasi program dan kegiatan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 sampai dengan Triwulan II tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018 TRIWULAN II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	316.650.000	4.885.000	1,54
				Pengembangan Lumbung Masyarakat	60.890.000	4.206.000	6,91
				Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat	21.800.000	14.050.000	64,45
				Dewan Ketahanan Pangan	65.637.600	25.910.000	39,47

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembinaan Distribusi dan Akses Pangan	79.295.000	19.712.000	24,86
2	Tingkat Konsumsi Pangan Utama	Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Beras	Pengembangan Pengane- karagaman Konsumsi Pangan	Pengembangan Diversifikasi Pangan/Tanaman	83.259.800	18.485.000	22,20
				-Pemyuluhan Sumber Pangan Alternatif	34.362.680	5.427.200	15,79
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Daging/Unggas		Gerakan Peningkatan Konsumsi Susu, Telor dan Daging untuk Gizi Keluarga	27.743.200	0	0
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Ikan		Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan	37.743.200	0	0
		Skore Pola Pangan Harapan		Penilaian Skor PPH	26.668.480	3.100.000	11,62
3	Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar (tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)	Persentase Pangan segar yang tercemar	Peningkatan Pengawasan Pangan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	51.268.000	3.450.000	6,73
4	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.780.000	1.471.000	82,64
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.840.000	5.020.468	26,65
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3.460.000	1.837.300	53,10
				Penyebarluasan Informasi dan Topuksi SKPD	11.000.000	0	0
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.200.000	1.400.000	13,73
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.337.200	26.577.500	97,22
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.410.000	4.314.000	24,78
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor	950.000	950.000	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.643.750	872.000	1,72
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.020.000	42,50
				Penyediaan Makanan dan Minuman	15.560.000	9.188.000	59,05
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	164.000.000	91.108.150	55,55
				Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis	36.450.000	15.168.500	41,61
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	24.407.920	3.400.000	13,93
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindaklanjuti	Peningkatan Sarana/Prasarana	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	212.400.000	138.891.900	65,39
				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	18.916.000	7.465.000	39,46
		Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.520.000	1.096.600	12,87
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti					

Untuk Penyerapan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp. 479.395.618,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.572.042.830,- atau sebesar 30,50%. Dari 6 (*enam*) program dengan 29 (*dua puluh sembilan*) kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun 2018 dapat disimpulkan realisasi anggaran untuk Triwulan II sebagai berikut:

1. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari pagu anggaran tahun 2018 Rp 316.650.000,- realisasi untuk triwulan II Rp. 4.885.000,- (1,54 %)
2. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lumbung Masyarakat dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.60.890.000,- realisasi untuk triwulan II Rp. 4.206.000,- (6,91%)
3. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.21.800.000,- realisasi untuk triwulan II Rp. 14.050.000,- (64,45%)
4. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.65.637.600,- realisasi untuk triwulan II Rp. 25.910.000,- (39,47%)
5. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pembinaan Distribusi dan Akses Pangan dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.79.295.000,- realisasi untuk triwulan II Rp. 19.712.000,- (24,86%)
6. Capaian Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pangan / Tananaman dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.83.259.800,- realisasi untuk triwulan II Rp. 18.485.000,- (22,20 %)
7. Capaian Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.34.362.680,- realisasi untuk triwulan II Rp. 5.427.000,- (15,79%)
8. Capaian Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Gerakan Peningkatan Konsumsi Telor, Susu, dan Daging untuk gizi keluarga dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.27.743.200,- realisasi untuk triwulan II Rp. 0,- (0%)
9. Capaian Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.37.743.200,- realisasi untuk triwulan II Rp. 0,- (0%)
10. Capaian Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Penilaian Skor PPH dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.26.668.480,- realisasi untuk triwulan II Rp. 3.100.000,- (11.62%)

11. Capaian Program Peningkatan Pengawasan Pangan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dari pagu anggaran tahun 2018 Rp. 51.268.000,- realisasi untuk triwulan II Rp. 3.450.000,- (6,73%)
12. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari pagu anggaran tahun 2018 Rp. 384.438.870,- realisasi untuk triwulan II Rp. 162.326.918,- (42,22%)
13. Capaian Program Peningkatan Sarana Prasarana dari pagu anggaran tahun 2018 Rp. 231.3160.000,- realisasi untuk triwulan I Rp. 146.356.900,- (63,27%)
14. Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dari pagu anggaran tahun 2018 Rp. 8.520.000,- realisasi untuk triwulan I Rp. 1.096.600,- (12,87%)

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan PD teknis dalam bidang ketahanan pangan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Dari Standar Pelayanan Minimal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dulunya Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengambil 4 (empat) pelayanan dasar untuk digunakan sebagai target kinerja pelayanan. Empat pelayanan dasar tersebut meliputi Ketersediaan dan Cadangan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, serta Penanganan Kerawanan

Pangan. Uraian mengenai kinerja pelayanan SKPD pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2016 (%)	Realisasi Tahun 2016 (%)	Target Tahun 2017 (%)	Realisasi Tahun 2017 (%)
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	70	80	90	81,50
B	Distribusi dan Akses Pangan	2 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	80	90	80	90
C	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	74,5	73,97	79,72	80,90
		4 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	80	80	80
D	Penanganan Kerawanan Pangan	5 Penanganan Daerah Rawan Pangan	100	100	100	100

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

2.4.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu penting di tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Pembinaan Desa Mandiri Pangan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang dapat diberdayakan dengan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha baik dalam budidaya tanaman pertanian, pengolahan hasil panen menjadi pangan olahan yang meningkatkan keuntungan masyarakat dalam mendukung keperluan hidup keluarga

2. Pemantauan dan Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi terjadinya kerawanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu ada, hal ini tergambar berakitan dengan data tentang klasifikasi Tingkatan Keluarga yang dihimpun oleh Badan KB Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sebagai bahan dalam melakukan deteksi awal terjadinya kerawanan

pangan melalui kegiatan Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui SKPG ini tergambar bahwa dikabupaten HSS secara ketersediaan pangan pada umum aman namun dilihat dari segi akses pangan menggambarkan kondisi waspada dan rawan hal ini tergambar dari masih tinggi angka keluarga Pra sejahtera, dari kemungkinan ini maka diperlukan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3. Pemantauan dan Pembinaan Distribusi pangan masyarakat

Produksi pangan masyarakat (beras) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari data hasil produksi dan perhitungan keperluan pangan masyarakat selama ini mencukupi tapi perlu kewaspadaan dalam distribusi baik dalam wilayah kabupaten maupun ke luar kabupaten, dikawatirkan distribusi pangan(beras) yang besar keluar wilayah kabupaten berdampak terjadi kekurangan stock pangan (beras) dalam daerah, sehingga diperlukan berkembangnya lembaga yang berusaha dibidang perberasan, pemerintah pusat dan Provinsi telah merintis lembaga ini melalui kegiatan PL-DPM (Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), TTI (Toko Tani Indonesia) sebagai upaya menjaga kestabilan harga pangan, Anggaran kegiatan Kabupaten dimanfaatkan mendukung pembinaan kelembagaan tersebut.

4. Pembinaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan

Kecukupan pangan masyarakat (beras) secara berkelanjutan dan terjangkau suatu kondisi yang mendukung pembangunan bidang pangan untuk menciptakan kestabilan keamanan negara. Program kegiatan yang dilakukan pembinaan pemanfaatan lumbung pangan masyarakat desa sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan desa merupakan upaya penyediaan cadangan pangan masyarakat didesa, Pemerintah kabupaten berupaya merealisasikan pelayanan minimal dengan mealokasikan Anggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

5. Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Kondisi keamanan pangan yang beredar di Masyarakat perlu pembinaan dan pengawasan terkait sering dijumpainya pemakaian bahan pewarna, pengawet dan pemakaian insectisida di atas ambang aman dikonsumsi atau bahkan bahan-bahan yang dilarang pemanfaatannya.

6. Penurunan Konsumsi Beras

Dalam upaya mewujudkan Ketahanan pangan Daerah seiring dengan peningkatan Jumlah Penduduk, bertambahnya luas lahan untuk perumahan dan kemungkinan besar teradinya pengurangan lahan sawah, diperlukan pembinaan pemanfaatan dan pengembangan budidaya sumber pangan lokal non beras.

7. Penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat

Kualitas dan Kuantitas konsumsi pangan masyarakat sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masih belum memenuhi target, terkait dengan permasalahan ini diperlukan upaya-upaya melalui Pengembangan Rumah Pangan Lestari, Pembinaan Lomba Cipta Menu serta budaya konsumsi pangan yang Beragam Bergizi sehat dan Aman

8. Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Organisasi lintas sektoral diluar kedinasan yang dibentuk sebagai mitra pemerintah, Keberadaannya memberikan masukan, saran, pertimbangan teknis kepada pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan menyangkut pangan.

Rencana jangka pendek di fokuskan pada beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan desa mandiri pangan
2. Pengembangan lumbung pangan desa
3. Koordinasi kebijakan perberasan
4. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
5. Penyuluhan sumber pangan alternatif

Untuk rencana jangka panjang akan difokuskan pada kegiatan :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkelanjutan
2. Terwujudnya stabilitas harga dan pasokan pangan
3. Penurunan konsumsi pangan (beras)
4. Terkendalinya distribusi pangan (beras) keluar daerah
5. Terjaminnya mutu dan keamanan pangan
6. Pengelolaan pangan lokal non beras menjadi komoditas komersial

2.4.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang di berikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melaksanakan kegiatan pada awal tahun, di samping menyesuaikan RKA dan DPA yang sudah disusun, juga menyesuaikan situasi keadaan yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan program dan kegiatan yang sudah disusun, agar dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan, perlu dilakukan review rancangan rencana program dan kegiatan yang mengakibatkan review RKPD.

Review terhadap rancangan awal Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review rancangan rencana program dan kegiatan dilakukan untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan program dan kegiatan yang sudah disusun, agar dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan. Selain itu, Review juga dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan Rencana Kerja (Renja) dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS yang ditetapkan.

Hasil review terhadap rancangan awal dengan analisa kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.5 berikut ini.

**Tabel.2.5 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2018
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Non Urusan										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	81		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	81		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Belanja Pengiriman Surat dan Laporan Berupa Materai dan Pengiriman Surat/Laporan	12 Bulan	1.900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Belanja Materai 6000, Jumlah Belanja Materai 3000, jumlah belanja pengiriman surat	160 lembar, 20 Laporan, 140 lembar, 20 buah	1.780.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Pembayaran Belanja Rekening Jasa Telepon serta internet. Pembayaran belanja rekening jasa listrik dan air	12 bulan 12 bulan 12 bulan	19.000.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, jumlah pembayaran rek internet, jumlah pembayaran rek air, jumlah pembayaran rek listrik	1 Rekening 1 Rekening 2 Rekening, 2 Rekening	18.840.000	
	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Perizinan Mobil Dinas dan Kendaraan Dinas Roda Dua	10 unit	3.950.000	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Pembayaran Pajak STNK Mobil Dinas, Jumlah Pembayaran STNK Kendaraan Roda 2	1 buah 8 buah	3.460.000	

	Penyebarluasan Informasi dan Tupoksi OPD	SKPD	Terlaksananya Pameran di Tk. Kabupaten dan Propinsi	2 kali		Penyebarluasan Informasi dan Tupoksi OPD	SKPD	Jumlah Pelaks. Pameran di Tk Kab(Kandang an Expo & Pawai Pembangunan)	2 kali	9.000.000	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor, Belanja Service Komputer,Laptop,LC D,printer serta AC	15 unit	10.100.000	Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan kantor(Komputer,laptop,printer, dan AC	31 buah	10.200.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Pembelian Alat Tulis Kantor	12 Bulan	28.700.000	Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor	46 Jenis	28.471.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Penyediaan untuk cetak dan penggandaan	12 bulan	18,200,000	Barang cetak dan penggandaan	SKPD	Jumlah untuk penggandaan (fotocopy), jumlah utk penjilidan, jumlah untuk cetak map dan amplop, jumlah untuk cetak digital printing	57.600 lembar, 40 eksemplar, 16 pak, 45 meter	17.986.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Pembelian Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	12 bulan	1.100.000	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah pembelian komponen/peralatan listrik	5 jenis	950.0000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Pembelian Belanja Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Bahan Pembersih Kantor	12 Bulan	49.150.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah Pembelian Peralatan Kantor, jumlah pembelian peralatan kebersihan/ bahan pembersih	13 buah 6 jenis	50.643.750	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Pembelian Belanja Surat Kabar/Majalah	3 buah	2.650,000	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Surat Kabar	2 jenis surat kabar	2.400.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Belanja makanan dan minuman rapat bulanan, belanja makanan dan minuman tamu, belanja makanan dan minuman kegiatan Tausyiah	11 kali 11 kali 11 bulan	17.550.000	Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah makanan/mi numan utk kegiatan Tausyiah, jumlah makanan/mi numan utk tamu, jumlah makanan/mi numan utk Rakor SKPD, jumlah makanan/mi numan utk rapat bulanan	11 kali 11 kali 1 kali 12 kali		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	100.650.550	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 tahun	142.650.550	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Penyediaan Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi/Tenaga Kantor	12 bulan	29.000.000	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Admnistrasi/tenaga kantor selama 12 bulan	3 orang	28.950.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi Dalam Daerah	SKPD	Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	11.500.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Koordinasi Dalam Daerah	SKPD	Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun	10.000.000	

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	450.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dilakukan rehap dan pemeliharaan	1 Unit	212.400.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Pemeliharaan Mobil Dinas	1 Unit	24.400.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Terpeliharanya Mobil Dinas	1 Unit	23.592.000	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Belanja Cetak, Pengandaan dan Penjilidan Laporan SKPD, Laporan Keuangan, Laporan DPA dan Laporan Hasil	30 Dokumen	9.000.650	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Belanja Cetak, Pengandaan dan Penjilidan Laporan SKPD, Laporan Keuangan, Laporan DPA dan Laporan Hasil	30 Laporan	8.800.000	
	WAJIB										
	PANGAN										
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)										
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	SKPD	Jumlah Meningkatnya Lumbung Pangan dan Jumlah Meningkatnya Cadangan Pangan	17 Lumbung	476.410.000	Pengembangan Lumbung Masyarakat	SKPD	Jumlah Rehab Bangunan Lumbung Masyarakat	2 Lumbung	60.890.000	

	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Tambahan Stok Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kab.HSS	76 Ton	0	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah meningkatnya lumbung pangan dan Jumlah meningkatnya Cadangan Pangan	29.000 Kilo	324.720.000	
	Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat	Kabupaten	Lumbung Pangan Masyarakat	4 Lumbung	26.200.000	Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat	SKPD	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang ditingkatkan	4 Lumbung	26.200.000	
	Koordinasi Kebijakan Perberasan	SKPD	Jumlah LUEP/Pasar yang dilakukan Pemantauan Akses Distribusi Pangan	9 Lembaga	158.200.000	Pembinaan Distribusi dan Akses Pangan	SKPD	Jumlah Pelaksanaan P-LDPM	1 Paket	79.632.500	
	Dewan Ketahanan Pangan	SKPD	Laporan Dewan Ketahanan Pangan	2 Laporan	93.270.000	Dewan Ketahanan Pangan	SKPD	Jumlah Laporan Dewan Ketahanan Pangan	2 Laporan	93.270.000	
5	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan										
	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	SKPD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penyuluhan Pola B2SA, Penyuluhan Gizi Keluarga P2WKSS dan Demplot Pemanfaatan Pekarangan	11 desa	116.988.000	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	SKPD	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang aktif	8 KWT	45.511.000	
	Pengembangan diversifikasi pangan/tanaman	SKPD	Jumlah desa yang mengalami percepatan diversifikasi pangan	10 desa	164.100.000	Pengembangan Diversifikasi Pangan/Tanaman	SKPD	Jumlah Kebun Bibit Kabupaten yang menjadi pilot project pemanfaatan pekarangan	1 unit	62.365.500	

	Gerakan Peningkatan Konsumsi, Susu, Telor dan Daging untuk Gizi Keluarga	SKPD	Konsumsi Susu/Telor/daging	325 Orang	0	Gerakan Peningkatan Konsumsi, Susu, Telor dan Daging untuk Gizi Keluarga	SKPD	Jumlah sekolah yang menjadi pilot project	1 SD	37.820.000	
	Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan	SKPD	Konsumsi Ikan	390 Orang	0	Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan	SKPD	Jumlah Posyandu yang menjadi pilot project	1 Posyandu	37.820.000	
	Penilaian Skor PPH	SKPD	Laporan PPH Kabupaten	1 Laporan	0	Penilaian Skor PPH	SKPD	Jumlah Laporan PPH Kabupaten	1 Laporan	37.777.500	
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	SKPD	Terlaksananya Pembinaan Desa Mandiri Pangan	16 desa	120.500.000	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	SKPD	Jumlah desa yang mendapat pendampingan	7 desa	142.670.000	
6	Program Peningkatan Pengawasan Pangan										
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penyuluhan Mutu dan Keamanan Pangan	49 desa	66.700.000	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	SKPD	Persentase Pangan Segar yang Diawasi	4 Komoditas	54.888.000	
Total					1.589.980.000					1.553.299.630	

2.5 Rencana Program/Kegiatan Prioritas

Pada Renja Murni Tahun 2018 Pagu Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 1.553.299.630. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Selatan N0:SE-910/656/Bakeuda yang mengamanatkan SKPD untuk menyusun Renja Kerja Anggaran Perubahan serta pengurangan belanja sebesar 1% dari total belanja langsung masing-masing SKPD. Maka Dinas Ketahanan melakukan perubahan renja kerja, dimana dalam Renja Kerja Anggaran Perubahan pagu berkurang sebesar Rp 36.680.370 sehingga total PAGU SKPD menjadi Rp 1.553.299.630. Berikut beberapa Program/Kegiatan Prioritas yang mengalami pergeseran/pengurangan anggaran:

1. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pangan/Tanaman Pagu sebelum perubahan sebesar Rp 83.259.800. Terkait dengan keikutsertaan dalam Hari Pangan Sedunia (HPS) yang akan dilaksanakan di Marabahan, dan kegiatan HPS Expo di Banjarbaru Kalimantan Selatan sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran sehingga Pagu Kegiatan menjadi Rp 148.009.800
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pagu Murni sebesar Rp 316.650.000. Terkait dengan permasalahan selisih harga antara BULOG dengan Tim Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dimana pada DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pada sub belanja cadangan pangan sebesar 29.000 Kg harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp 10.000,- per Kg. Sedangkan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan Keputusan Direksi Bulog adalah Rp 10.276,- Untuk mengatasi Permasalahan tersebut dilakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan HET yang ditetapkan. Sehingga Pagu setelah perubahan sebesar Rp 328.250.000,-
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pembinaan Distribusi dan Akses Pangan Pagu murni sebesar 79.295.000, dalam anggaran perubahan pagu menjadi 37.015.000. Hal ini terkait dengan pengurangan anggaran.
4. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Gerakan Konsumsi Susu, Telor dan Daging untuk Gizi Keluarga pagu murni

sebesar Rp 27.743.200. Kegiatan ini dalam anggaran perubahan menjadi Rp. 0 (tidak dilaksanakan). Hal ini terkait dengan pengurangan anggaran.

5. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan Pagu murni sebesar Rp 37.743.200. Kegiatan ini dalam anggaran perubahan menjadi Rp. 0 (tidak dilaksanakan). Hal ini terkait dengan pengurangan anggaran.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD.

Proses usulan kegiatan dilakukan dari bawah dimulai dari musrenbang tingkat desa dilanjutkan tingkat kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing - masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang kecamatan. Dari Musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri oleh semua SKPD teknis dihasilkan usulan yang dibagi dalam tiga (3) bidang yaitu Sosial Budaya, Ekonomi dan Sarana dan Prasarana. Dari tiga bidang tersebut dibawa oleh masing –masing perwakilan dari kecamatan untuk dikawal dan dipertahankan di Musrenbang tingkat Kabupaten dengan dukungan dari anggota DPRD dapil masing-masing.

Pada Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2017 tidak terdapat usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD Hasil Reses yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Kebijakan Nasional

Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sasaran utama prioritas Nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri;
- (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah

- dalam rangka memperkuat stabilitas harga
- (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal.

b. Kebijakan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan pada urusan Pangan ini yang memuat visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan mengacu pada visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021.

Bidang Ketahanan Pangan adalah salah satu urusan yang tertuang dalam Misi 5 RPJMD yakni ***Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan***; dengan Prioritas Utama adalah Kalimantan Selatan Sentra Pangan, yang salah satu sasarnya Mewujudkan Kalimantan Selatan Mandiri Pangan. Hal ini dijabarkan dalam 5 tahun kedepan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Program 1). Program Peningkatan Kemandirian Pangan dengan kegiatan Peningkatan Desa Mandiri Pangan, Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat, Peningkatan skor PPH Ketersediaan, 2). Program Diversifikasi Pangan Masyarakat dengan kegiatan Persentase penurunan konsumsi beras perkapita/thn, Peningkatan skor PPH Konsumsi.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Penyusunan rencana berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

VISI :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Melalui Cadangan Pangan Daerah dan Lumbung Pangan Masyarakat”

Mempunyai makna bahwa Dinas Ketahanan Pangan berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan, makin membaiknya capaian pola pangan harapan, dan meningkatnya keragaman konsumsi pangan dan gizi yang berimbang.

MISI :

Mewujudkan visi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- a. Menjaga Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah
- b. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
- c. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Tujuan

1. Terjaganya Ketersediaan Pangan
2. Tercukupinya Konsumsi Pangan
3. Terjaminnya Keamanan Pangan Segar
4. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Adapun Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program/kegiatan, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik
2. Menganalisa ketersediaan energi dan protein perkapita, penguatan cadangan pangan, ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah, stabilitas pangan dan pasokan pangan, skor pola pangan harapan, keamanan pangan, kerawanan pangan.
3. Mengembangkan ketersediaan pangan daerah, meningkatkan aksesibilitas pangan di tingkat rumah tangga di wilayah rawan pangan melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

4. Mengembangkan cadangan pangan daerah berbasis sumber daya pangan lokal dan penguatan kelembagaan pengelolaan cadangan dan distribusi pangan
5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan meningkatkan kampanye pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
6. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan di daerah
7. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar dan olahan
8. Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah
9. Memperkuat distribusi bahan pangan

Dengan terlaksanannya tujuan dari penyusunan Rencana Kerja SKPD maka diharapkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terlaksana dengan baik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Secara rinci sasaran Dinas Ketahanan Pangan diuraikan sebagai berikut :

1. Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama
2. Tingkat Konsumsi Pangan Utama
3. Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar (tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)
4. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Strategi :

1. Menciptakan keamanan dan stok pangan guna menuju ketahanan pangan yang tangguh
2. Menjaga ketersediaan cadangan pangan masyarakat

3. Pengembangan kelembagaan pangan di pedesaan (desa mapan, lumbung pangan masyarakat, lembaga distribusi pangan)
4. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
5. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi, beragam, berimbang dan aman dikonsumsi
6. Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat agar mampu memanfaatkan secara optimal sumber daya di sekitarnya
7. Pengawasan dan pembinaan mutu pangan olahan masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 melaksanakan serangkaian Program dan Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

1. Pengembangan Lumbung Pangan Desa/Masyarakat
2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
3. Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat
4. Pembinaan Distribusi dan Akses Pangan
5. Dewan Ketahanan Pangan

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
2. Pengembangan Diversifikasi Pangan/Tanaman
3. Gerakan Peningkatan Konsumsi Susu, Telor dan Daging
4. Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan
5. Penilaian Skore PPH
6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Program Peningkatan Pengawasan Pangan

1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Pelaksanaan kegiatan selama ini tidak mengalami kendala yang berarti baik untuk waktu pelaksanaan maupun lokasinya, hanya keterbatasan dana setiap tahunnya yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan kami membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Harapan kami kedepan agar pendanaan dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang mendukung kemajuan petani sehingga ketahanan pangan melalui cadangan pangan daerah dan lumbung pangan masyarakat dapat terwujud.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dapat menjamin terciptanya tata pamong (*governance*) yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan antar program. Selain itu tujuan adanya kaidah merupakan kelanjutan program yang dilakukan. Dengan adanya *governance* yang baik di harapkan implementasi program menjadi lebih terukur.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang ketahanan pangan tahun 2018. Keberhasilan renja tergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, Instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian penyusunan perubahan renja ini, sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah serta peningkatan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan sejalan dengan visi “*Terwujudnya Ketahanan Pangan Melalui Cadangan Pangan Daerah dan Lumbung Pangan Masyarakat*”.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kebijakan, program dan Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasar Peraturan Daerah Nomor 037 Tahun 2009 hasilnya tetap memerlukan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bidang dan sekretariat sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Kandangan, Juni 2018

Kepala Dinas



Ir. H. RUHAIMI ALMAN, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19601014 198703 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN KEPALA DINAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	6
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II 2018	10
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Rencana Program/Kegiatan Prioritas	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	29
3.3 Program dan Kegiatan.....	32
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2019		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											341.623.500	395.532.070	53.908.570								
2.03.2.03.01.01.01	Jasa Surat Menyurat	Jumlah Belanja materai 6000; Jumlah Belanja pengiriman laporan; Jumlah Belanja materai 3000; Jumlah Belanja pengiriman surat	Jumlah Belanja pengiriman surat; Jumlah Belanja materai 3000; Jumlah Belanja pengiriman laporan; Jumlah Belanja materai 6000	-	-	SKPD	SKPD	160 lembar;20 Laporan;140 lembar;20 buah	20 buah;140 lembar;20 Laporan;160 lembar	1.780.000	1.780.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 buah;0 lembar;0 Laporan;0 lembar	-	berjalan	0			
2.03.2.03.01.01.02	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon; Jumlah Pembayaran Rekening Internet; Jumlah Pembayaran Rekening Air; Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon; Jumlah Pembayaran Rekening Internet; Jumlah Pembayaran Rekening Air; Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	-	-	SKPD	SKPD	1 Rekening;1 Rkening;2 Rekening;2 Rekening	1 Rekening;1 Rkening;2 Rekening;2 Rekening	18.840.000	18.840.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Rekening;0 Rkening;0 Rekening;0 Rekening	-	berjalan	0			
2.03.2.03.01.01.06	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran Pajak STNK Mobil Dinas; Jumlah Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Roda 2	Jumlah Pembayaran Pajak STNK Mobil Dinas; Jumlah Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Roda 2	-	-	SKPD	SKPD	1 buah;8 buah	1 buah;8 buah	3.460.000	3.460.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 buah;0 buah	-	berjalan	0			
2.03.2.03.01.01.07	Penyebarluasan Informasi dan Tupoksi OPD	Jumlah Pelaksanaan Pameran di Tk. Kabupaten (Kandang Expo dan Pawai Pembangunan)	Jumlah Pelaksanaan Pameran di Tk. Kabupaten (Kandang Expo dan Pawai Pembangunan)	-	-	SKPD	SKPD	2 Kali	2 Kali	9.000.000	11.000.000	2.000.000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	berjalan	0			
2.03.2.03.01.01.09	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor (Komputer, Laptop, Printer dan AC)	Jumlah pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor (Komputer, Laptop, Printer dan AC)	-	-	SKPD	SKPD	31 buah	31 buah	10.200.000	10.200.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 buah	-	berjalan	0			
2.03.2.03.01.01.10	Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	-	-	SKPD	SKPD	46 Jenis	46 Jenis	28.471.200	27.337.200	(1.134.000)	-	-	0 Jenis	-	berjalan	0			

2.03.2.03.01.01.11	Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah untuk penggandaan (fotocopy); Jumlah untuk penjilidan; Jumlah untuk Cetak Map dan Amplop; Jumlah untuk cetak digital printing	Jumlah untuk cetak digital printing; Jumlah untuk Cetak Map dan Amplop; Jumlah untuk penggandaan (fotocopy)	-	-	SKPD	SKPD	57.600 lembar;40 eksampler;16 pak;45 meter	45 meter;16 pak;40 eksampler;57.600 lembar	17.986.000	17.410.000	(576.000)	-	-	0 meter;0 pak;0 eksampler;0 lembar	-	berjalan	0
2.03.2.03.01.01.12	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian komponen/peralatan listrik	Jumlah Pembelian komponen/peralatan listrik	-	-	SKPD	SKPD	5 jenis	5 jenis	950.000	950.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis	-	berjalan	0
2.03.2.03.01.01.13	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian peralatan kantor; Jumlah Pembelian peralatan kebersihan/bahan pembersih	Jumlah Pembelian peralatan kebersihan/bahan pembersih; Jumlah Pembelian peralatan kantor	-	-	SKPD	SKPD	13 buah;6 jenis	6 jenis;15 buah	50.643.750	52.643.750	2.000.000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis;0 buah	-	alternatif	0
2.03.2.03.01.01.15	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar	Jumlah Surat Kabar	-	-	SKPD	SKPD	2 jenis surat kabar	2 jenis surat kabar	2.400.000	2.400.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis surat kabar	-	berjalan	0
2.03.2.03.01.01.17	Makanan dan Minuman	Jumlah makanan/minuman untuk Kegiatan Tausyiah; Jumlah makanan/minuman untuk tamu; Jumlah makanan/minuman untuk rapat koordinasi SKPD; Jumlah makanan/minuman untuk rapat bulanan	Jumlah makanan/minuman untuk rapat bulanan; Jumlah makanan/minuman untuk rapat koordinasi SKPD; Jumlah makanan/minuman untuk tamu; Jumlah makanan/minuman untuk Kegiatan Tausyiah	-	-	SKPD	SKPD	11 kali;11 kali;1 kali;12 kali	12 kali;1 kali;11 kali;11 kali	16.292.000	15.560.000	(732.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 kali;0 kali;0 kali;0 kali	-	berjalan	0
2.03.2.03.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	-	-	SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	142.650.550	167.181.120	24.530.570	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	alternatif	0
2.03.2.03.01.01.19	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Administiras/Tenaga Kantor selama 12 bulan	Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Administiras/Tenaga Kantor selama 12 bulan	-	-	SKPD	SKPD	3 orang	3 orang	28.950.000	36.450.000	7.500.000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 orang	-	berjalan	0
2.03.2.03.01.01.20	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	10.000.000	30.320.000	20.320.000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	alternatif	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										235.992.000	232.896.000	(3.096.000)						
2.03.2.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dilakukan rehap dan pemeliharaan	Jumlah gedung kantor yang dilakukan rehap dan pemeliharaan	-	-	SKPD	SKPD	1 Unit	1 Unit	212.400.000	212.400.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit	-	berjalan	0
2.03.2.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Terpeliharanya Mobil Dinas	Jumlah Terpeliharanya Mobil Dinas	-	-	SKPD	SKPD	1 Unit	1 Unit	23.592.000	20.496.000	(3.096.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit	-	alternatif	0

7	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								8.800.000	8.520.000	(280.000)							
2.03.2.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Laporan SKPD, Laporan Keuangan, Laporan DPA dan Laporan Hasil	Jumlah Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Laporan SKPD, Laporan Keuangan, Laporan DPA dan Laporan Hasil	-	-	SKPD	SKPD	30 Laporan	30 Laporan	8.800.000	8.520.000	(280.000)	-	-	0 Laporan	-	berjalan	0
Pangan																		
16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)								584.712.500	513.592.600	(71.119.900)							
2.03.2.03.01.09.18	Pengembangan Lumbung Masyarakat	Jumlah Rehab Bangunan Lumbung Masyarakat	Jumlah Rehab Bangunan Lumbung Masyarakat	-	-	SKPD	SKPD	2 Lumbung	2 Lumbung	60.890.000	60.890.000	-	-	-	0 Lumbung	-	berjalan	0
2.03.2.03.01.19.23	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan/pembelian cadangan beras pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan/pembelian cadangan beras pemerintah daerah	-	-	Kabupaten	Kabupaten	29.000 Kilo	29.000 Kilo	324.720.000	328.250.000	3.530.000	-	-	0 Kilo	-	alternatif	0
2.03.2.03.01.19.23	Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung Masyarakat yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Lumbung Masyarakat yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya	-	-	SKPD	SKPD	4 Lumbung	4 Lumbung	26.200.000	21.800.000	(4.400.000)	-	-	0 Lumbung	-	berjalan	0
2.03.2.03.01.19.23	Pembinaan Distribusi dan Akses Pangan	Jumlah Kemitraan yang Aktif	Jumlah Kemitraan yang Aktif	-	-	SKPD	SKPD	2 Mitra Usaha	2 Mitra Usaha	79.632.500	37.015.000	(42.617.500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Paket;0 Dokumen;0 Paket;0 Paket	-	alternatif	0
2.03.2.03.01.19.23	Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Dewan Ketahanan Pangan	-	-	SKPD	SKPD	2 Laporan	2 Laporan	93.270.000	65.637.600	(27.632.400)	-	-	0 Laporan	-	berjalan	0
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan										363.964.000	351.490.960	(12.473.040)						
2.03.2.03.01.19.30	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang aktif	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang aktif	-	-	SKPD	SKPD	8 KWT	8 KWT	45.511.000	34.362.680	(11.148.320)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	0
2.03.2.03.01.19.16	Pengembangan Diversifikasi Pangan/Tanaman	Jumlah Kebun Bibit Kabupaten yang menjadi pilot project pemanfaatan pekarangan	Jumlah Kebun Bibit Kabupaten yang menjadi pilot project pemanfaatan pekarangan	-	-	SKPD	SKPD	1 unit	1 unit	62.365.500	148.009.800	85.644.300	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	alternatif	0
2.03.2.03.01.19.19	Gerakan Peningkatan Konsumsi, Susu, Telor dan Daging untuk Gizi Keluarga	Jumlah sekolah yang menjadi pilot project	Jumlah sekolah yang menjadi pilot project	-	-	SKPD	SKPD	1 SD	1 SD	37.820.000	-	(37.820.000)	-	-	0 Orang	-	alternatif	0
2.03.2.03.01.19.19	Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan	Jumlah Posyandu yang menjadi pilot project	Jumlah Posyandu yang menjadi pilot project	-	-	SKPD	SKPD	1 posyandu	1 posyandu	37.820.000	-	(37.820.000)	-	-	0 Orang	-	alternatif	0
2.03.2.03.01.19.19	Penilaian Skor PPH	Jumlah Laporan PPH Kabupaten	Jumlah Laporan PPH Kabupaten	-	-	SKPD	SKPD	1 Laporan	1 Laporan	37.777.500	26.668.480	(11.109.020)	-	-	0 Laporan	-	berjalan	0
2.03.2.03.01.19.14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah desa yang mendapat pendampingan	Jumlah desa yang mendapat pendampingan	-	-	SKPD	SKPD	7 desa	7 desa	142.670.000	142.450.000	(220.000)	-	-	0 desa	-	berjalan	0

Program Peningkatan Pengawasan Pangan										54.888.000	51.268.000	(3.620.000)							
2.03.2.03.01.19.22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang diawasi	Persentase pangan segar yang diawasi	-	-	SKPD	SKPD	4 Komoditas	4 Komoditas	54.888.000	51.268.000	(3.620.000)	-	-	0 Komoditas	-	berjalan	0	
JUMLAH										1.589.980.000	1.553.299.630	(36.680.370)							

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

Generated at:21-08-2018 07:41:37, Oleh:User SKPD-2

Kandangan, Juni 2018

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Ir. H. RUHAIMI ALMAN, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19601014 198703 1 009